

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejak Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dikeluarkan maka setiap instansi pemerintah dari tingkat pusat, propinsi, hingga tingkat kabupaten/kota wajib mengimplementasikan dan mengembangkan e-government secara bertahap sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*), memfasilitasi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pemerintah, meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan menempatkan kepentingan rakyat pada posisi sentral pemerintahan, serta memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional.

Pengembangan dan implementasi e-government pada tingkat daerah harus berjalan sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 (pengganti UU No.22 tahun 1999) Tentang Pemerintah Daerah, sehingga setiap daerah memiliki hak untuk melaksanakan implementasi e-government sesuai dengan karakter masing-masing daerah berdasarkan konsep otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan pengembangan e-government sejak diberlakukannya Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bandung No. 17 tahun 1996 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Bandung. Namun Pengembangan e-government tersebut berjalan cukup lambat. Sudah sekitar 10 tahun berjalan, namun masih belum semua unit kerja yang memiliki Sistem Informasi, belum semua Sistem Informasi di setiap unit kerja yang terbangun terhubung pada jaringan Sistem Informasi Daerah (SIMDA), serta tidak optimalnya pemanfaatan situs web Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai media publikasi dengan informasi yang sangat tidak *up to date*.

Identifikasi karakteristik permasalahan pengembangan e-government tersebut sangat menentukan terhadap solusi yang akan diimplementasikan. Dengan menemukan karakteristik permasalahan yang dihadapi maka dapat pula ditentukan solusi yang tepat, sehingga pengembangan e-government yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tercermin dalam efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik permasalahan pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini?
2. Bagaimana solusi yang tepat terhadap permasalahan pengembangan e-government yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Dari perumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik permasalahan pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Menentukan solusi yang tepat terhadap permasalahan pengembangan e-government yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Rumusan solusi terhadap permasalahan pengembangan e-government yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bandung dalam melakukan pengembangan e-government sehingga dapat meningkatkan kontribusi e-government terhadap tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), yang tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Bagi penulis : dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam bidang pengembangan e-government, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dunia nyata.
3. Bagi peneliti lain : sebagai informasi dan sumber ide, baik untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, maupun untuk melakukan penelitian lain yang masih berkenaan dengan pengembangan e-government.

### **1.5 BATASAN PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada batasan masalah berikut, sehingga diharapkan permasalahan yang dibahas lebih terarah dan tepat pada tujuan.

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Permasalahan yang berhubungan dengan perhitungan investasi tidak dibahas dalam penelitian ini.
3. Analisa dilakukan terhadap pengolahan data yang diperoleh selama kurun waktu penelitian (bulan Desember hingga awal Februari 2005), perubahan yang terjadi setelah itu tidak dimasukkan dalam analisa.

*STTTTELKOM*